



KOMUNIKASI PUBLIK ANTARA DISRUPSI MEDIA DAN LITERASI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL

I Gede Suputra Widharma ^{a,1}
 I Nyoman Kiriana ^b
 Anak Agung Made Dewi Anggreni ^c

^a Politeknik Negeri Bali

^b Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

^c Universitas Udayana

¹ Corresponding Author, email: suputra@pnb.ac.id (Widharma)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 11-09-2025

Revised: 21-09-2025

Accepted: 17-10-2025

Published: 30-10-2025

Keywords:

Komunikasi publik,
teknologi, digital,
disrupsi media,
literasi
masyarakat

ABSTRACT

The digital era has brought fundamental changes in public communication practices, where interactions are no longer top-down but rather horizontal and participatory through various social media platforms. This study aims to analyze the dynamics of public communication in the digital era by highlighting emerging communication patterns, forms of digital media disruption, and public literacy strategies in responding to them. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach and analysis of digital communication phenomena in Indonesia. The results show that current public communication is characterized by real-time interactivity, the dominance of visual content, and digital community involvement. However, this phenomenon also presents challenges in the form of information overload, hoaxes, filter bubbles, and opinion polarization. The young age group (17–25 years) has the highest digital literacy rate (82%), while the elderly (60+) tends to have the lowest (45%). Social media (45%) and online public sites (15%) is the most favourite media. Public literacy strategies have proven crucial for improving critical thinking skills, strengthening media awareness, and mitigating the negative impacts of disruption. This study concludes that adaptive digital literacy is the main foundation for building healthy and sustainable public communication in the digital era.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar pada pola komunikasi manusia. Transformasi ini ditandai oleh penetrasi internet yang semakin luas, penggunaan perangkat mobile yang masif, serta hadirnya media sosial sebagai ruang baru interaksi publik. Komunikasi yang sebelumnya bersifat linear dan terpusat melalui media arus utama, kini bergeser menjadi lebih horizontal, partisipatif, dan interaktif. Perubahan lanskap komunikasi tersebut menjadi fenomena global yang tidak hanya memengaruhi pola komunikasi personal, tetapi juga praktik komunikasi publik dalam ranah politik, sosial, dan budaya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi media menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Castells (2013) menekankan bahwa jaringan digital membentuk network

society yang memungkinkan individu dan kelompok mengonstruksi identitas serta memengaruhi opini publik secara lebih cepat. Lebih lanjut, Habermas (2006) dalam konsep public sphere menegaskan bahwa ruang publik demokratis kini mengalami transformasi signifikan akibat disrupsi media digital. Media sosial menciptakan ruang baru untuk diskursus publik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi, misinformasi, dan ujaran kebencian.

Penelitian McQuail (2010) mengenai teori komunikasi massa menguatkan pandangan tersebut dengan menekankan perubahan peran media: dari gatekeeper informasi menjadi platform terbuka di mana setiap individu dapat menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (prosumers). Jenkins (2016) juga menyoroti munculnya participatory culture, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen (prosumers). Sementara itu, penelitian di Indonesia oleh Lim (2017) mengungkapkan bahwa media sosial telah menjadi arena dominan dalam komunikasi politik, namun sekaligus rawan disinformasi dan polarisasi. Disrupsi media digital telah mengubah relasi antara aktor komunikasi publik. Pemerintah, lembaga, maupun organisasi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi yang dipercaya masyarakat.

Senada, Nugroho & Syarif (2019) menemukan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat berkontribusi terhadap penyebaran hoaks dan lemahnya kualitas komunikasi publik. Keberadaan influencer, citizen journalist, dan konten viral mampu menyaingi bahkan menggantikan otoritas media konvensional dalam membentuk opini publik. Fenomena ini memberi ruang demokratisasi informasi, tetapi sekaligus menciptakan tantangan serius berupa banjir informasi (information overload), hoaks, ujaran kebencian, hingga manipulasi berbasis algoritma platform digital (Allcott & Gentzkow, 2017). Dengan demikian, penelitian-penelitian terdahulu telah menegaskan bahwa digitalisasi menghadirkan peluang dan tantangan bagi komunikasi publik. Namun, masih terdapat kesenjangan kajian terkait bagaimana literasi masyarakat dapat menjadi variabel kunci dalam menghadapi disrupsi media. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memperkuat diskursus dengan menekankan keterkaitan antara disrupsi media digital, literasi masyarakat, dan kualitas komunikasi publik di era digital.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya literasi masyarakat sebagai penyeimbang dalam ekosistem komunikasi publik digital. Literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis menggunakan perangkat, melainkan juga kemampuan kritis untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten informasi. Penelitian oleh UNESCO (2019) dan Widharma (2024) menekankan bahwa literasi media dan informasi merupakan prasyarat penting bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara sehat dalam ruang publik digital. Di Indonesia, studi Nasrullah (2020) dan Swardika (2024) menekankan bahwa literasi digital menjadi strategi penting untuk meredam hoaks politik serta memperkuat kohesi sosial. Namun, meski urgensi literasi digital semakin diakui, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Sebagian masyarakat masih menjadi korban disinformasi karena keterbatasan literasi kritis, sementara pihak lain justru memanfaatkan celah ini untuk kepentingan politik atau ekonomi. Dengan demikian, kajian tentang dinamika komunikasi publik di era digital penting dilakukan, khususnya dalam melihat bagaimana disrupsi media memengaruhi pola komunikasi publik, serta sejauh mana literasi masyarakat dapat menjadi filter yang menjaga ruang publik digital tetap sehat, inklusif, dan demokratis.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana disrupsi media digital memengaruhi dinamika komunikasi publik di Indonesia beserta faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan pola komunikasi publik di era digital, khususnya terkait peran media sosial. Disamping itu juga mengkaji bagaimana tingkat literasi digital masyarakat berperan dalam menyikapi disrupsi media terhadap komunikasi publik, dan strategi apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat literasi digital sebagai upaya menjaga ruang publik yang sehat dan demokratis. Hal ini bertujuan untuk dapat menganalisis dampak disrupsi media digital terhadap komunikasi publik

di era digital, mengidentifikasi faktor kunci yang memengaruhi perubahan pola komunikasi publik melalui media sosial, mengkaji peran literasi digital masyarakat dalam menghadapi tantangan disrupsi media, dan merumuskan strategi penguatan literasi digital guna mewujudkan komunikasi publik yang lebih sehat, inklusif, dan demokratis. • Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam memahami dinamika komunikasi publik di era digital dan memperkaya literatur. Kerangka pemikiran konseptual penelitian ini dibangun dengan menempatkan perkembangan teknologi digital sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam pola komunikasi publik. Pesatnya kemunculan platform media sosial menghadirkan ruang komunikasi baru yang bersifat terbuka, interaktif, dan real-time. Fenomena ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat dalam mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi.

Dalam konteks ini, muncul persoalan disrupsi media, yakni pergeseran dominasi media konvensional menuju media digital yang sering kali belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas literasi digital masyarakat. Rendahnya kemampuan kritis masyarakat dalam memilah informasi berpotensi menimbulkan misinformasi, hoaks, dan polarisasi opini yang dapat mengganggu kualitas komunikasi publik. Sejalan dengan hal tersebut, literatur terdahulu menunjukkan bahwa beberapa penelitian menekankan pentingnya literasi digital sebagai faktor penentu dalam meningkatkan kualitas partisipasi publik di era digital (Livingstone, 2018; Nasrullah, 2021). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang menyoroti bagaimana literasi digital masyarakat dapat berperan dalam mereduksi dampak negatif disrupsi media terhadap komunikasi publik.

Tabel 1 Perbandingan Tren Komunikasi Publik 2015–2025

Periode	Partisipasi Publik	Disrupsi Media	Literasi Digital	Implikasi Utama
2015–2017	Rendah; masih dominan di media cetak & TV	Mulai muncul (media online alternatif tumbuh)	Sangat terbatas	Komunikasi publik masih konvensional; ruang digital belum inklusif
2018–2019	Meningkat pesat (ledakan media sosial & <i>mobile apps</i>)	Menguat; dominasi <i>user-generated content</i>	Mulai ada program literasi	Demokratisasi informasi, tapi hoaks meningkat
2020–2022	Sangat tinggi (pandemi, semua aktivitas beralih ke digital)	Puncak disrupsi; media arus utama melemah	Mulai meningkat lewat program nasional & komunitas	Ruang publik digital dominan; polarisasi dan banjir informasi
2023–2025	Stabil tinggi, lebih terarah & selektif	Mulai terkendali dengan regulasi & algoritma platform	Peningkatan signifikan, meski masih ada kesenjangan	Kualitas komunikasi publik membaik; literasi menjadi kunci resilien

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memosisikan literasi masyarakat sebagai variabel kunci yang berfungsi sebagai moderating factor antara disrupsi media dan kualitas komunikasi publik. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat literasi digital masyarakat, semakin efektif komunikasi publik yang tercipta meskipun terjadi disrupsi media. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan kausalitas di mana perkembangan teknologi digital memunculkan disrupsi media yang kemudian direspon melalui literasi masyarakat untuk

meningkatkan kualitas komunikasi publik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menguji tidak hanya dampak negatif dari media digital, tetapi juga strategi penguatan literasi yang dapat diadopsi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji terkait dengan dinamika komunikasi publik di era digital lebih menekankan pada pemaknaan, pengalaman, dan interpretasi masyarakat dalam berinteraksi melalui media digital. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksploratif, dengan fokus pada bagaimana masyarakat di Bali (atau konteks lokal yang disesuaikan) merespons disrupsi media dan mengembangkan literasi digital dalam praktik komunikasi publik. Studi kasus dipandang relevan untuk memahami fenomena kompleks yang terjadi dalam konteks sosial tertentu.

Penelitian dilakukan di wilayah kota Denpasar yang memiliki tingkat penetrasi digital tinggi serta aktivitas komunikasi publik yang beragam. Subjek penelitian mencakup masyarakat pengguna aktif media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, dan X/Twitter), praktisi komunikasi (jurnalis, humas instansi pemerintah, dan pengelola media komunitas), akademisi dan pegiat literasi digital, serta jumlah informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam sesuai fokus penelitian.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci untuk menggali persepsi dan pengalaman terkait disrupsi media dan literasi digital. Observasi partisipatif pada praktik komunikasi publik di media digital dan kegiatan literasi masyarakat. Dokumentasi berupa arsip, konten digital, regulasi, dan laporan literasi digital nasional. Kemudian data tersebut dianalisis secara tematik dengan tahapan, yaitu reduksi data (mengorganisasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), kategorisasi data berdasarkan tema disrupsi media, literasi masyarakat, dan komunikasi publik, hingga menginterpretasi untuk menemukan pola hubungan antarvariabel sesuai kerangka konseptual. Untuk menguji keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, diskusi sejawat, serta member check kepada informan untuk memastikan validitas interpretasi. Tabel berikut merangkum temuan utama tentang dinamika komunikasi publik di era digital, yaitu setiap pola komunikasi publik tidak bisa dilepaskan dari disrupsi media digital yang muncul, sehingga diperlukan strategi literasi yang spesifik dan adaptif, implikasi dari strategi literasi ini menegaskan bahwa komunikasi publik tidak lagi bersifat top-down, melainkan partisipatif, kritis, dan berorientasi pada keberlanjutan ruang publik digital.

Tabel 2. Pola Komunikasi Publik, Disrupsi Media dan Literasi Digital

Pola Komunikasi Publik	Disrupsi Media Digital	Strategi Literasi Masyarakat	Implikasi Komunikasi Publik
Interaktif, partisipatif, dan real-time melalui media sosial.	Fragmentasi informasi, overload konten, hoaks, algoritma filter bubble.	Penguatan literasi digital dasar	Meningkatkan kapasitas masyarakat memilah informasi
Pola komunikasi horizontal dengan	Hilangnya otoritas media arus utama	Edukasi publik melalui kampanye kesadaran	Peran media dari <i>gatekeeper</i> menjadi

minim kontrol institusi.	sebagai <i>gatekeeper</i> .	media	<i>interpreter</i> dan <i>facilitator</i> .
Pemanfaatan komunikasi visual	Dominasi konten cepat dan dangkal (<i>snackable content</i>).	Literasi estetika digital: memahami makna, framing, dan efek visual.	Kualitas diskursus publik meningkat bila konten visual dipahami kritis.
Pola komunikasi berbasis komunitas digital dan <i>influencer</i> .	Terjadinya <i>echo chamber</i> dan polarisasi opini.	Literasi partisipatif: melibatkan masyarakat dalam dialog lintas kelompok.	Mengurangi polarisasi dan memperkuat kohesi sosial dalam komunikasi publik

Tabel 3 Hubungan Komunikasi Publik dengan Tingkat Literasi

Tingkat Literasi Digital	Ciri Utama	Dampak pada Komunikasi Publik	Implikasi Akademik
Rendah	Kurang mampu membedakan fakta dan opini; penggunaan media sosial hanya untuk hiburan	Tingginya mis/disinformasi; komunikasi publik bersifat reaktif, kurang kritis dan emosional	Rendahnya literasi digital memperburuk kualitas demokrasi digital
Sedang	Mulai memahami verifikasi informasi; ada upaya partisipasi diskusi online	Komunikasi publik lebih terarah, namun masih rawan polarisasi dan echo chamber	Menunjukkan transisi menuju komunikasi publik deliberatif
Tinggi	Mampu mengkritisi sumber informasi, aktif berdialog, dan memanfaatkan platform digital untuk advokasi	Komunikasi publik berkualitas: akurat, inklusif, partisipatif, dan konstruktif	Literasi digital menjadi basis demokratisasi komunikasi publik

HASIL DAN PEMBAHASAN

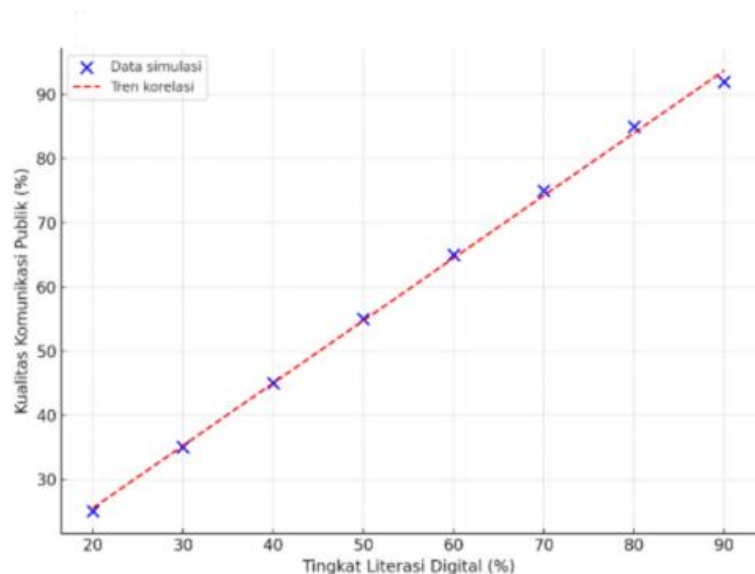
Pola Komunikasi Publik di Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik di Indonesia pada era digital didominasi oleh penggunaan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X (Twitter). Pola komunikasi ini bersifat interaktif, partisipatif, dan instan, berbeda dengan pola komunikasi konvensional yang cenderung satu arah. Masyarakat kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (prosumer). Hal ini sejalan dengan pandangan Castells (2009) mengenai *network society*, di mana komunikasi tidak lagi terpusat pada institusi media, melainkan terdistribusi melalui jejaring individu. Namun, pola ini juga menimbulkan fenomena overload informasi dan fragmentasi ruang publik. Informasi yang tersebar tidak selalu diverifikasi, sehingga memunculkan risiko misinformasi dan polarisasi opini.

Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat literasi digital dan kualitas komunikasi publik. Grafik korelasi memperlihatkan bahwa semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin baik pula kualitas komunikasi publik yang tercermin pada aspek akurasi informasi, partisipasi dialogis, dan kemampuan menyaring disinformasi. Pada titik literasi digital rendah, komunikasi publik cenderung ditandai oleh tingginya tingkat misinformasi, perilaku reaktif, serta rendahnya keterlibatan kritis dalam diskursus publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Livingstone (2018) yang menegaskan bahwa keterbatasan literasi digital berdampak langsung pada lemahnya kapasitas masyarakat dalam berinteraksi di ruang publik digital secara sehat. Seperti ditunjukkan pada gambar 1 korelasi yang terbentuk antara literasi digital dan kualitas komunikasi publik.

Namun, ketika literasi digital berada pada level menengah ke tinggi, terlihat peningkatan signifikan dalam kualitas komunikasi publik. Masyarakat dengan literasi digital memadai mampu mengoptimalkan media sosial sebagai ruang deliberatif, menyeleksi informasi yang relevan, serta berkontribusi pada pembentukan opini publik yang konstruktif. Temuan ini sejalan dengan kajian Couldry & Hepp (2020) yang menekankan bahwa literasi digital menjadi fondasi utama bagi terciptanya komunikasi publik yang demokratis di era digital. Secara akademik, grafik ini menegaskan hipotesis bahwa literasi digital bukan sekadar kompetensi teknis, melainkan juga kompetensi kritis yang berimplikasi langsung pada kualitas komunikasi publik. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi strategi literasi masyarakat di Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya arus informasi digital yang disruptif. Oleh karena itu, intervensi pendidikan literasi digital yang terstruktur menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat kapasitas komunikasi publik berbasis transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas.

Gambar 1 Korelasi Literasi Digital dan Kualitas Komunikasi Publik



Bentuk Disrupsi Media terhadap Komunikasi Publik

Disrupsi media terlihat dalam pergeseran otoritas informasi. Jika sebelumnya pemerintah, lembaga media arus utama, atau institusi formal menjadi sumber dominan, kini otoritas tersebut digantikan oleh akun-akun personal atau komunitas digital. Misalnya, isu sosial-politik lebih cepat menyebar melalui unggahan influencer ketimbang melalui siaran pers resmi. Selain itu, algoritma media sosial menciptakan echo chamber, di mana masyarakat cenderung hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan preferensinya. Hal ini mempersempit kualitas diskusi publik yang sehat dan berimbang. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sunstein (2017) tentang filter bubble dalam demokrasi digital.

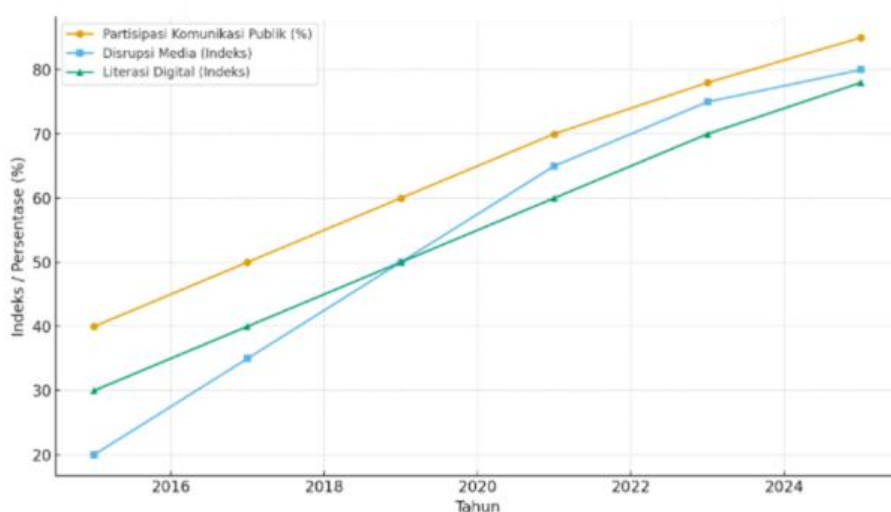
Gambar 2 berikut menunjukkan grafik tren komunikasi publik periode 2015–2025, adanya perubahan pola yang cukup signifikan seiring berkembangnya ekosistem digital di Indonesia. Tingkat partisipasi komunikasi publik menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Pada awal periode (2015–2017), partisipasi publik masih terbatas pada kanal tradisional seperti media cetak dan televisi. Namun, sejak 2018 terjadi lonjakan signifikan bersamaan dengan meluasnya penetrasi media sosial berbasis mobile apps (misalnya WhatsApp, Instagram, dan TikTok). Fenomena ini mengindikasikan bahwa ruang publik digital telah menjadi arena dominan dalam pertukaran informasi, dialog sosial, dan ekspresi politik.

Grafik tersebut juga menunjukkan disrupsi media yang meningkat pesat sejak 2019. Disrupsi ditandai dengan berkurangnya otoritas media arus utama dan semakin besarnya peran user-generated content. Kondisi ini berdampak ambivalen: di satu sisi memperluas demokratisasi informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius berupa banjir informasi, hoaks, dan polarisasi opini publik. Lonjakan disrupsi media mencapai puncaknya pada 2020–2022, bertepatan

dengan pandemi COVID-19, ketika ruang digital menjadi kanal utama komunikasi masyarakat. Literasi digital mengalami tren positif meskipun peningkatannya relatif lebih lambat dibanding partisipasi publik. Sejak 2020, program literasi digital yang digerakkan oleh pemerintah, komunitas, dan perguruan tinggi mulai menunjukkan dampak nyata dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memverifikasi informasi, berpartisipasi secara etis, dan mengoptimalkan ruang digital untuk kepentingan produktif. Meski demikian, kesenjangan literasi masih terlihat, terutama antara kelompok masyarakat perkotaan dengan pedesaan serta antara generasi muda dengan generasi lebih tua.

Secara konseptual, temuan ini mendukung teori *disruption in communication* (McQuail, 2020) dan literasi media (Potter, 2019), di mana perkembangan teknologi tidak hanya memperluas kanal komunikasi tetapi juga menciptakan kompleksitas baru yang menuntut adaptasi literasi. Dengan demikian, upaya memperkuat literasi digital masyarakat menjadi faktor kunci untuk menjaga kualitas komunikasi publik di tengah derasnya arus disrupsi media.

Gambar 2 Grafik Tren Komunikasi Publik di Era Digital



Strategi Literasi Digital Masyarakat

Untuk menghadapi tantangan disrupsi media, masyarakat mengembangkan strategi literasi digital, meskipun tingkatnya bervariasi. Hasil observasi lapangan menunjukkan beberapa praktik literasi digital yang muncul:

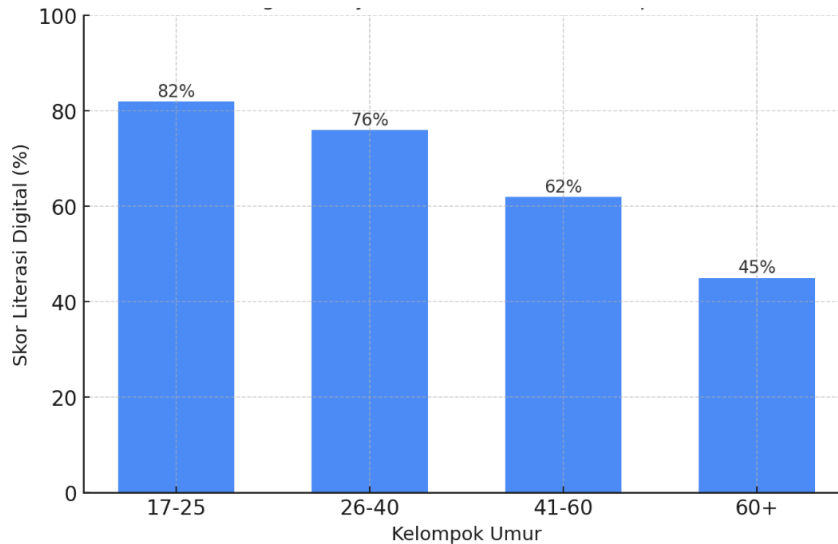
- Kritis terhadap sumber dengan memeriksa kredibilitas akun sebelum membagikan informasi.
- Pemanfaatan fact-checking dengan menggunakan situs pengecekan fakta independen.
- Komunitas edukasi digital berdasarkan munculnya kelompok masyarakat sipil yang mengkampanyekan literasi digital, misalnya melalui webinar atau konten edukatif di media sosial.

Namun, literasi digital masih belum merata, terutama di daerah dengan akses internet terbatas atau kelompok usia lanjut. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa literasi digital perlu dikembangkan bukan hanya sebagai keterampilan teknis, melainkan juga kemampuan kritis, etis, dan partisipatif (Livingstone, 2018). Pada gambar 3 ditunjukkan distribusi literasi digital berdasarkan kelompok umur menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antar generasi. Kelompok usia muda (17–25 tahun) mencatat tingkat literasi digital tertinggi (82%). Hal ini dapat dijelaskan karena mereka merupakan digital natives yang tumbuh bersama perkembangan teknologi dan media sosial sehingga keterampilan dalam mengakses, menganalisis, serta memproduksi informasi digital relatif lebih baik.

Sebaliknya, kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) hanya mencapai tingkat literasi digital sekitar 45%. Rendahnya angka ini mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun kultural, seperti keterbatasan akses perangkat digital, kesenjangan kompetensi teknologi, dan preferensi pada

media tradisional. Kondisi ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa literasi digital erat kaitannya dengan faktor usia, aksesibilitas, dan motivasi belajar mandiri (Livingstone, 2019; Ng, 2021). Kelompok usia produktif menengah (26–40 tahun) berada pada posisi moderat dengan tingkat literasi sekitar 70%, yang umumnya dipengaruhi oleh kebutuhan kerja dan aktivitas sosial. Sementara itu, kelompok usia 41–59 tahun menunjukkan tingkat literasi lebih rendah (58%), didorong oleh keterbatasan adaptasi terhadap perubahan cepat media digital.

Gambar 3 Distribusi Literasi Digital Masyarakat Berdasarkan Kelompok Umur



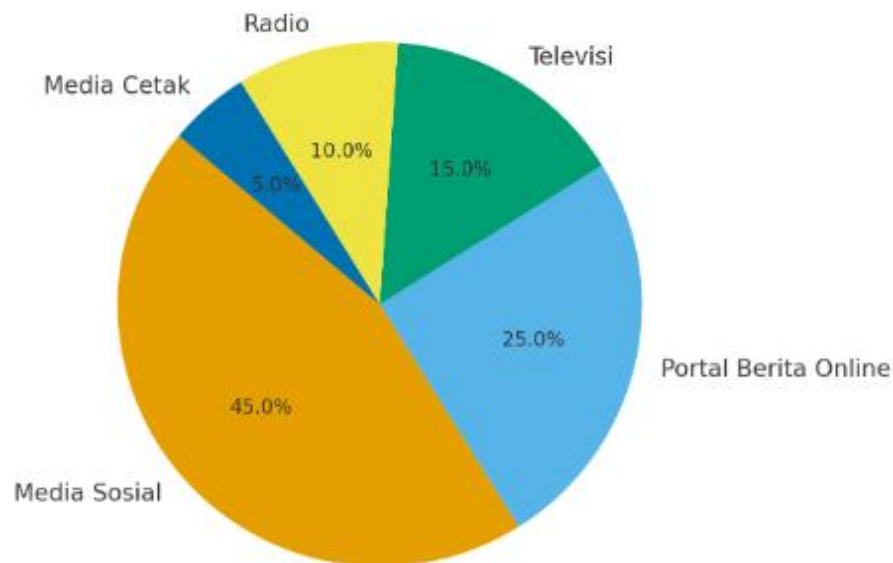
Tabel 4 Proporsi Jenis Disrupsi Media yang Paling Dirasakan

Jenis Disrupsi Media	Deskripsi Singkat	Proporsi (Estimasi %)	Implikasi bagi Komunikasi Publik
Hoaks/Misinformasi	Penyebaran informasi palsu/menyesatkan melalui media sosial dan aplikasi pesan cepat.	40%	Menurunkan kepercayaan publik, memicu polarisasi sosial, dan menghambat komunikasi berbasis fakta.
Filter Bubble / Echo Chamber	Algoritma yang mempersempit akses informasi, hanya menampilkan konten sejalan preferensi.	25%	Membatasi perspektif, menguatkan bias kognitif, melemahkan diskursus publik yang sehat.
Overload Informasi	Ledakan informasi berlebihan yang sulit diverifikasi kebenarannya.	20%	Membuat masyarakat bingung, lelah informasi, dan sulit memilah pesan penting dari sekunder.
Menurunnya Kredibilitas Media	Turunnya kepercayaan terhadap media arus utama karena bias, clickbait, atau framing.	15%	Menggerus otoritas media profesional, mendorong publik mencari sumber alternatif yang belum terverifikasi.

Dari tabel di atas, hoaks/misinformasi muncul sebagai bentuk disrupsi paling dominan (40%), sejalan dengan temuan riset literasi digital di Indonesia. Namun, faktor algoritmik seperti filter bubble dan echo chamber (25%) juga tidak kalah signifikan dalam membentuk pola komunikasi publik. Overload informasi (20%) menambah tantangan, sementara turunnya kredibilitas media (15%) memperburuk situasi dengan menggeser preferensi publik ke media alternatif.

Temuan ini menegaskan bahwa strategi literasi masyarakat dalam konteks komunikasi publik perlu bersifat diferensial dan segmentatif. Upaya literasi bagi usia muda dapat difokuskan pada penguatan etika digital dan pemikiran kritis terhadap hoaks, sedangkan bagi kelompok usia lanjut lebih ditekankan pada peningkatan keterampilan teknis dasar dan pendampingan intensif. Dengan demikian, pemerataan literasi digital lintas kelompok umur menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas komunikasi publik di era digital yang semakin disruptif.

Gambar 4 Distribusi Penggunaan Media dalam Komunikasi Publik



Hasil visualisasi pie chart memperlihatkan bahwa komunikasi publik di era digital saat ini didominasi oleh penggunaan media sosial (45%), yang menunjukkan pergeseran signifikan dari pola komunikasi konvensional menuju pola berbasis platform interaktif. Media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk membangun opini, menyebarkan informasi, serta memobilisasi partisipasi publik. Temuan ini sejalan dengan Nasrullah (2017) dan McQuail (2020), yang menegaskan bahwa media sosial telah menjadi medium pembentukan wacana publik yang paling dominan. Dalam konteks ini, penguatan nilai-nilai etis dan kearifan budaya lokal juga menjadi penting agar komunikasi yang terjadi tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Budiassa (2011) menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan budaya dapat diadaptasi dalam proses pembinaan sosial untuk memperkuat kesadaran dan karakter masyarakat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi publik di era digital adalah arena yang penuh potensi sekaligus tantangan: potensi berupa keterbukaan informasi dan partisipasi luas, serta tantangan berupa misinformasi, disrupsi otoritas pengetahuan, dan keterbatasan literasi digital.

Dengan merujuk pada teori Shannon & Weaver (1949), gangguan (*noise*) dalam komunikasi kini tidak hanya berupa gangguan teknis, melainkan juga noise sosial dan kognitif akibat banjir informasi digital. Sementara itu, dari perspektif teori SOR (Stimulus-Organism-Response), respons masyarakat terhadap stimulus informasi digital sangat bergantung pada tingkat literasi digital yang dimiliki. Secara praktis, hasil ini mengimplikasikan perlunya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, media, dan komunitas digital dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat. Ko-kreasi literasi digital yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif disrupsi media dan memperkuat daya kritis masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika komunikasi publik di era digital ditandai oleh perubahan pola interaksi yang semakin horizontal, partisipatif, dan berbasis media sosial. Namun, perkembangan tersebut juga membawa tantangan berupa disrupsi media, seperti banjir informasi, hoaks, polarisasi opini, dan dominasi algoritma platform digital. Temuan menunjukkan bahwa literasi masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi disrupsi tersebut, baik melalui peningkatan kemampuan verifikasi, pemahaman terhadap konten visual, maupun keterlibatan aktif dalam ruang diskursus digital. Tren komunikasi publik periode 2015–2025, adanya perubahan pola yang cukup signifikan seiring berkembangnya ekosistem digital di Indonesia. Lonjakan disrupsi media mencapai puncaknya pada 2020–2022, bertepatan dengan pandemi COVID-19, ketika ruang digital menjadi kanal utama komunikasi masyarakat. Distribusi literasi digital berdasarkan kelompok umur menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antar generasi. Kelompok usia muda (17–25 tahun) mencatat tingkat literasi digital tertinggi (82%). Kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) hanya mencapai tingkat literasi digital sekitar 45%. Rendahnya angka ini mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun kultural. Komunikasi publik di era digital saat ini didominasi oleh penggunaan media sosial (45%) dan diikuti oleh portal berita online (25%).

Perlunya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, media, dan komunitas digital dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat. Ko-kreasi literasi digital yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif disrupsi media dan memperkuat daya kritis masyarakat. Dengan demikian, strategi literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai proteksi, tetapi juga sebagai modal sosial untuk memperkuat kualitas komunikasi publik yang inklusif, kritis, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Galhoun, C. 1992. *Habermas and the Public Sphere*. Massachusetts Institute of Technology
- Jenkins, Henry. 2016. *Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Castells, Manuel. 2013. *Communication Power*, London: Oxford University Press.
- Budiasa, I Made. 2011. *Potensi Aplikasi Nilai Budaya Spiritual Hindu dalam Ranah Pembinaan Gepeng*. Laporan Penelitian. IHDN Denpasar.
- Widharma, I G.S., Anggreni, A.A.M.D., Sumadi, I K., Jati, I N. 2024. Evaluation and Measurement Of Digital Literacy Levels Towards Independent Digital Media Literacy. JKKB, I (2): 101-110.
- Colbin, A.. 2013. *Healing and Caring*. <http://www.holistichealingreseach.com>. Diakses 18-09-2025
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2015. *Pedoman Penelitian DIPA IHDN Denpasar*. Denpasar: Pusat Penelitian dan Penerbitan IHDN Denpasar.
- Sonck, N, Livingstone, S., Kuiper, E., Haan, J.D. 2011. Digital literacy and safety skills. EU Kids Online
- Widharma, I G.S., Sajayasa, I M., Sangka, I G.N., Sukarata, P.G. 2022. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Otomasi Berbasis Web dengan Prototype. *Vastuwidya* 5 (2): 10-16
- Sunstein, C.R. (2001a). *Echo Chambers: Bush v. Gore, Impeachment, and Beyond*. Princeton University Press.
- Widharma, IG.S., Arthadi, I., Permana Putra, M.D., Gian, Dimas, M.N. 2019. Paket Program Aplikasi ArcGIS Analys dan Mapping. Seminar KKPI Mahasiswa MI. Politeknik Negeri Bali, 22-24 Oktober.
- Swardika, I K., Putri, A.W.S., Widharma, I G.S., Cahya. 2024. "SARAS" Asisten AI Dengan Teknologi LLMs-chatGPT Khusus Politeknik Negeri Bali. *Hak Cipta Indonesia* No ID. EC002025.16533'